



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI PERIODE 2013-2020**

**I Gusti Ngurah Kadek Agus Subagia<sup>1</sup> Made Suyana Utama<sup>2</sup>**

**Abstract**

**Keywords:**

*Human Development Index;  
District Own Source Revenue;  
Capital Expenditures;  
Inequality of  
Income Distribution*

*The purpose of this study was to analyze the District Own Source Revenue, capital expenditures, and Inequality of Income Distribution on the Human Development Index in the Regency/City of Bali Province, either partially or simultaneously. The data used are secondary data, namely PAD data, capital expenditures, Gini ratio coefficient and HDI in the Regency/City of Bali Province for the 2013-2020 period so that the number of observations is 72 observations. The analysis technique used is multiple linear regression analysis with the help of Eviews software. The results of the study show that simultaneously PAD, Capital Expenditures, and Inequality of Income Distribution have an effect on the Human Development Index in the Regency / City of Bali Province. Partially PAD and Capital Expenditure have a positive effect on the Human Development Index. Partially the inequality of income distribution has a negative effect on the Human Development Index. The implication of this research is that the high regional income generation causes PAD to be more widely used to finance capital expenditures which have an impact on equitable development which is directly proportional to the rate of economic growth so that people's welfare can be achieved.*

**Kata Kunci:**

Indeks Pembangunan Manusia;  
Pendapatan Asli Daerah;  
Belanja Modal;  
Ketimpangan  
Distribusi Pendapatan

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali baik secara parsial maupun secara simultan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data PAD, belanja modal, koefisien gini rasio dan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2013-2020 sehingga diperoleh jumlah pengamatan yaitu 72 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software Eviews*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, Belanja Modal, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Secara parsial PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara parsial ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Implikasi dari penelitian ini adalah tingginya perolehan pendapatan daerah menyebabkan PAD dapat lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja modal yang berdampak terhadap pemerataan pembangunan yang berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

**Koresponding:**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana, Bali,  
Indonesia  
Email:  
ngurahsubagia29@gmail.com*

## PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan manusia dicerminkan dari seberapa mampu mengatasi permasalahan di masyarakat, seperti kemiskinan, buta huruf, dan ketahanan pangan (Pardede, 2021). Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mendorong terjadinya pelimpahan wewenang fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Oates (1993) dan Martinez & McNab (2001) menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat menciptakan situasi ekonomi lebih efisien sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi pusat ke daerah melalui penyediaan infrastruktur dan barang publik yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan daerah dalam menerapkan desentralisasi fiskal dapat dilihat dari kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah yang dapat diukur dengan menganalisis rasio komponen APBD (pendapatan dan pengeluaran daerah) yang telah ditetapkan (Halim, 2011). Menurut UU No. 23 tahun 2004, pendapatan daerah terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain yang sah. Hubungan antara PAD dengan IPM didasarkan pada teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa perekonomian akan meningkat apabila sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang kemudian akan mempengaruhi peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor publik sehingga akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PAD merupakan indikator yang kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah di sektor publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Delavallade (2006) berpendapat bahwa anggaran infrastruktur publik ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga akan dapat mewujudkan pembangunan manusia.

**Tabel 1.**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2013-2020 (Juta Rupiah Perkapita)**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	256	331	361	419	441	457	480	528
Tabanan	593	631	691	726	967	818	794	697
Badung	3.869	4.517	4.873	5.643	6.448	6.872	7.122	3.046
Gianyar	658	865	925	1.060	1.313	1.512	1.939	1.052
Klungkung	139	565	684	760	864	1.049	1.257	1.227
Bangli	115	344	395	469	465	542	558	456
Karangasem	347	589	596	567	481	483	559	523
Buleleng	330	342	454	434	696	510	552	479
Denpasar	1.355	809	882	897	1.098	1.002	1.055	748
Provinsi Bali	7.660	8.994	9.861	10.976	12.773	13.244	14.316	8.756

Sumber: BPS Provinsi Bali, data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali. Adanya dampak pandemi Covid-19 menyebabkan perolehan PAD di tahun 2020 mengalami penurunan untuk semua kabupaten/kota terkecuali kabupaten Jembrana yang mengalami peningkatan. Penelitian Setyowati & Suparwati (2012), menyatakan bahwa PAD akan mempengaruhi pembangunan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan publik yang akan meningkatkan kegiatan belanja modal pemerintah daerah yang akan berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik akan turut

mendorong terciptanya pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Bati (2009) menemukan adanya hubungan positif belanja modal terhadap IPM, karena belanja modal yang dilakukan untuk pengadaan fasilitas publik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arsyad (2010) mengemukakan tujuan utama pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan antar daerah. Menurut Mirza (2012), pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang artinya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi akan turut meningkatkan IPM daerah tersebut. Namun, ketimpangan distribusi pendapatan justru memiliki korelasi negatif terhadap IPM.

**Tabel 2.**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2013-2020**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	68,39	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35	72,36
Tabanan	72,31	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16	76,17
Badung	77,63	77,98	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59	81,60
Gianyar	74,00	74,29	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14	77,36
Klungkung	68,08	68,30	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71	71,73
Bangli	65,47	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35	69,36
Karangasem	63,70	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34	67,35
Buleleng	68,83	69,19	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30	72,55
Denpasar	81,32	81,65	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68	83,93
Provinsi Bali	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50

*Sumber:* BPS Provinsi Bali (2020)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali periode 2013-2020 di setiap Kabupaten/Kota mengalami peningkatan, namun masih terdapat daerah dengan tingkat IPM yang mengalami ketimpangan seperti Kabupaten Bangli dan Karangasem dengan tingkat IPM yang masih rendah dengan Kabupaten lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Yasa & Arka (2015) menemukan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif terhadap IPM. Ketimpangan distribusi pendapatan yang terus dibiarkan akan berimplikasi pada penurunan kesejahteraan masyarakat dan penurunan pertumbuhan ekonomi daerah (Patta, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, Mirza (2012) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan memiliki hubungan yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada wilayah yang bersangkutan, akan tetapi kesenjangan ekonomi yaitu ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut: pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh simultan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal, secara parsial berpengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020. Ketimpangan Distribusi Pendapatan berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020. Pemilihan lokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dimaksudkan untuk menganalisis beberapa variabel yang telah dipertimbangkan untuk dijadikan objek penelitian (yaitu variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ketimpangan distribusi pendapatan) yang mampu mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dijadikan pertimbangan oleh instansi/pihak-pihak terkait untuk dilaksanakannya program dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Variabel IPM diukur dengan menggunakan satuan indeks/poin, variabel PAD diukur dengan menggunakan satuan per kapita, variabel belanja modal diukur dengan menggunakan satuan per kapita, dan variabel ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menggunakan satuan poin. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui Badan pusat statistik (BPS) Provinsi Bali, jurnal, studi pustaka, dan literatur lain yang mendukung tentang obyek penelitian, dengan metode observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu gabungan data *cross section* sebanyak 9 yang diklasifikasikan menjadi 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali dan data *time series* sebanyak 8 tahun yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2020, sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian sebanyak 72 data. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data panel dengan tahapan sebagai berikut: pemilihan model estimasi data panel, uji validasi data panel, kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresinya yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y	=	Variabel terikat (Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali)
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi dari masing-masing X
$X_1$	=	Variabel bebas 1 (Pendapatan Asli Daerah)
$X_2$	=	Variabel bebas 2 (Belanja Modal)
$X_3$	=	Variabel bebas 3 (Ketimpangan Distribusi Pendapatan)
$\varepsilon$	=	Variabel pengganggu atau gangguan residual

Untuk memastikan model regresi bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), maka dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah itu dilakukan uji signifikansi koefisien regresi secara simultan (uji f) dan secara parsial (uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks yang mencakup tiga dimensi dasar manusia yaitu pertama, angka harapan hidup (AHH) yang menggambarkan kemampuan manusia untuk mampu memiliki umur panjang dan hidup sehat; kedua yaitu harapan lama sekolah (HLS), dan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai ukuran pendidikan dan dimensi standar hidup layak yang

diwakili oleh pengeluaran riil per kapita. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali periode 2013-2020 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2013-2020**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	68,39	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35	72,36
Tabanan	72,31	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16	76,17
Badung	77,63	77,98	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59	81,60
Gianyar	74,00	74,29	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14	77,36
Klungkung	68,08	68,30	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71	71,73
Bangli	65,47	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35	69,36
Karangasem	63,70	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34	67,35
Buleleng	68,83	69,19	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30	72,55
Denpasar	81,32	81,65	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68	83,93
Provinsi Bali	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50

Sumber: BPS, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2013-2020 dilevel Kabupaten/Kota terlihat masih cukup bervariasi. Meski tidak ada yang berstatus rendah namun terdapat dua kabupaten dengan level sedang, yaitu Kabupaten Bangli dan Karangasem. Sementara terdapat dua kabupaten dengan level tertinggi yaitu Kota Denpasar dengan indeks 83,93 poin dan Kabupaten Badung dengan nilai indeks 81,60 poin.

PAD memegang peranan penting untuk melihat tingkat kemandirian daerah dengan meminimalisir dana bantuan dari pusat (Sriyana, 2011). Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah menunjukkan bahwa PAD yang dimiliki mampu membiayai pembangunan daerah. Selain itu, PAD yang tinggi menunjukkan bahwa sumber pendapatan potensial yang dimiliki daerah juga tinggi sehingga apabila dapat dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan PAD masing-masing daerah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali periode 2013-2020 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4.**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020 (Juta Rupiah Perkapita)**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	256	331	361	419	441	457	480	528
Tabanan	593	631	691	726	967	818	794	697
Badung	3.869	4.517	4.873	5.643	6.448	6.872	7.122	3.046
Gianyar	658	865	925	1.060	1.313	1.512	1.939	1.052
Klungkung	139	565	684	760	864	1.049	1.257	1.227
Bangli	115	344	395	469	465	542	558	456
Karangasem	347	589	596	567	481	483	559	523
Buleleng	330	342	454	434	696	510	552	479
Denpasar	1.355	809	882	897	1.098	1.002	1.055	748
Provinsi Bali	7.660	8.994	9.861	10.976	12.773	13.244	14.316	8.756

Sumber: BPS, 2021

Tabel 4 menunjukkan secara keseluruhan dari periode 2013-2019 di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali, terdapat hanya 3 Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat PAD yang tinggi dalam mengukur rasio kemandirian keuangan daerah yaitu Kabupaten Badung sebesar 504,83 persen, Kota

Denpasar sebesar 85,46 persen, dan Kabupaten Gianyar sebesar 76,14 persen (BPS, 2021). Menurut data diketahui bahwa tahun 2020 terjadi penurunan PAD di masing-masing daerah akibat adanya pandemi Covid-19, namun Kabupaten Jembrana merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kabupaten ini bukan merupakan daerah tujuan wisata sehingga penurunan wisatawan tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan daerah.

Menurut Ayinde, *et al.* (2015) dan Badrudin (2011) belanja modal dilakukan untuk membiayai pembangunan daerah dalam penyediaan fasilitas publik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 5 menunjukkan fluktuasi realisasi anggaran belanja modal setiap Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 2013-2020. Peningkatan realisasi anggaran belanja modal Provinsi Bali terjadi dari periode 2013-2016, sedangkan periode setelahnya 2016-2020 realisasi anggaran belanja modal mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh capaian perolehan PAD pada masing-masing daerah mengalami laju peningkatan yang semakin rendah dari tahun ke tahun, sehingga penurunan atau kenaikan PAD sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada masing-masing daerah. Perkembangan Belanja Modal Provinsi Bali periode 2013-2020 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5.**  
**Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020 (Juta Rupiah Perkapita)**

Kabupaten /Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	532	600	686	1.188	886	1.244	784	297
Tabanan	298	315	259	586	658	492	419	411
Badung	1.302	1.575	1.498	1.893	1.918	1.368	1.215	652
Gianyar	381	410	453	620	811	583	487	802
Klungkung	132	571	680	817	1.064	840	723	647
Bangli	129	317	498	1.119	705	800	665	250
Karangasem	372	437	437	464	574	349	365	195
Buleleng	382	286	351	531	451	311	415	390
Denpasar	522	271	219	287	274	275	307	97
Provinsi Bali	4.050	4.781	5.081	7.504	7.342	6.263	5.378	3.740

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa selama periode 2013-2020 realisasi anggaran belanja modal setiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi. Realisasi anggaran belanja modal Kabupaten Badung memiliki anggaran belanja modal tertinggi terhadap total anggaran belanja modal di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sedangkan Kabupaten Bangli memiliki anggaran belanja modal terendah terhadap total anggaran belanja modal di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Peningkatan realisasi anggaran belanja modal Provinsi Bali terjadi dari periode 2013-2016, sedangkan periode setelahnya 2016-2020 realisasi anggaran belanja modal mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh capaian perolehan PAD pada masing-masing daerah mengalami laju peningkatan yang semakin rendah dari tahun ke tahun, sehingga penurunan atau kenaikan PAD sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada masing-masing daerah

Ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya daerah baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun infrastrukturnya (Arsyad, 2010). Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menggunakan koefisien gini rasio dan kurva Lorenz yang nilainya berkisar antara nol hingga satu. Koefisien gini rasio bernilai nol artinya terjadi ketimpangan pendapatan merata secara sempurna, sementara koefisien gini rasio bernilai satu artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan daerah berpusat pada satu daerah saja sebagai pusat perekonomian. Perkembangan gini rasio Provinsi Bali disajikan pada Tabel 6 berikut.

Ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2013-2020 dikategorikan dalam jenis tingkat ketimpangan yang rendah. Koefisien gini rasio menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 0,40 dan 0,42 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali pada dua tahun tersebut mengalami ketimpangan moderat atau sedang. Tahun 2015 hingga 2016, nilai gini rasio penduduk Provinsi Bali sebesar 0,38 dan 0,37 yang berarti terjadinya penurunan nilai kesenjangan pendapatan karena telah terjadi perbaikan pemerataan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Sementara tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Bali.

**Tabel 6.**  
**Gini Rasio di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020**

Kabupaten / Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	0,37	0,39	0,31	0,36	0,32	0,33	0,29	0,35
Tabanan	0,39	0,40	0,36	0,34	0,31	0,32	0,31	0,32
Badung	0,35	0,34	0,31	0,32	0,32	0,34	0,32	0,32
Gianyar	0,33	0,38	0,32	0,30	0,27	0,31	0,29	0,32
Klungkung	0,36	0,35	0,37	0,36	0,37	0,39	0,39	0,36
Bangli	0,31	0,33	0,38	0,35	0,30	0,31	0,27	0,28
Karangasem	0,33	0,34	0,31	0,29	0,32	0,34	0,31	0,33
Buleleng	0,38	0,39	0,34	0,34	0,31	0,34	0,29	0,29
Denpasar	0,36	0,38	0,36	0,33	0,34	0,34	0,35	0,33
Provinsi Bali	0,40	0,42	0,38	0,37	0,38	0,38	0,37	0,37

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan hasil pengujian data panel maka diperoleh keputusan bahwa model yang dipilih adalah model *common effect*. Hasil pengujian regresi dengan menggunakan model *common effect* disajikan pada tabel 7 berikut.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	77.12603	3.887693	19.83851	0.0000
PAD	1.409869	0.329907	4.273540	0.0001
BM	3.428804	1.311430	2.614554	0.0110
GR	-23.67472	11.28205	-2.098441	0.0396
R-squared	0.597794	F-statistic		33.68921
Adjusted R-squared	0.580050	Prob(F-statistic)		0.000000
S.E. of regression	2.933733	Durbin-Watson stat		1.117044

Sumber: data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 77,126 + 1,410 X_1 + 3,429X_2 - 23,674X_3 \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{Sig} = (0,00) \quad (0,01) \quad (0,03)$$

Berdasarkan hasil uji statistik F, menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 33,689 dengan nilai sig.  $F_{hitung} = 0,000 < \alpha = 0,05$  dapat disimpulkan variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, dan ketimpangan distribusi pendapatan secara simultan berpengaruh nyata dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2013-2020. Koefisien determinasi atau  $R^2 = 0,5978$  memiliki arti bahwa 59,78 persen variasi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu dijelaskan oleh variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020, I Gusti Ngurah Kadek Agus Subagia dan Made Suyana Utama*

belanja modal, dan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan 40,22 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai koefisien regresi  $\beta_1$  sebesar 1,41 dengan nilai  $t_{hitung} (4,274) > t_{tabel} (1,667)$  dan  $sig. t_{hitung} = 0,00 < \alpha = 0,05$  berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Makna koefisien regresi PAD sebesar 1,41 memiliki arti bahwa apabila PAD dinaikkan satu juta rupiah perkapita maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 1,41 poin dengan asumsi variabel bebas lain dalam model nilainya konstan. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan Desentralisasi Fiskal yang mengacu pada Derajat Desentralisasi yang merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah yang menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap TPD yang berarti, tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat mencerminkan tingginya kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi tanpa adanya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat (Dana Perimbangan) yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan terhadap pengalokasian anggaran terhadap anggaran belanja modal yang bersinggungan dengan pelayanan publik yaitu pembiayaan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, sehingga dengan adanya pembiayaan yang tinggi terhadap pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas taraf hidup manusia dengan tingginya angka harapan hidup, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, dan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.

Hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali sangat mempengaruhi pengadaan fasilitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut BPS menyatakan bahwa pengadaan fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan di Provinsi Bali kecenderungan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, diantara fasilitas tersebut, puskesmas terbantu merupakan sarana kesehatan yang keberadaannya paling banyak di Bali. Dari sisi persentase peningkatan sarana poliklinik meningkat paling tinggi selama setahun terakhir, tercatat naik sebesar 7,41 persen di tahun 2020. Pelayanan dalam dimensi pendidikan juga mengalami peningkatan. Peran pendidikan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Peningkatan untuk APK Perguruan Tinggi mengalami peningkatan sebesar 30,55 persen sedangkan APM Perguruan Tinggi meningkat sebesar 2,88 poin di tahun 2020. Pelayanan terhadap standar hidup layak juga terjadi peningkatan di Provinsi Bali dengan acuan adanya penurunan terhadap kemiskinan dan tingkat pengangguran di Provinsi Bali. Semenjak periode 2016 hingga 2019, persentase kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Bali cenderung menurun yaitu sebesar 3,61 persen dan 1,19 persen di tahun 2019, namun dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 kemiskinan di Provinsi Bali meningkat tajam. Di tahun 2020 tercatat angka kemiskinan Provinsi Bali meningkat sebesar 4,45 persen pada periode September. Jika dilihat dari perbandingan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan, persentase kemiskinan di perdesaan selalu lebih tinggi selama periode lima tahun terakhir. Pada September tahun 2020 tercatat sebanyak 5,40 persen penduduk miskin di perdesaan dan 4,04 persen penduduk miskin di perkotaan. Tren perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali periode 2016 hingga 2019 cenderung stagnan, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang pesat mencapai 5,63 persen dari 1,19 persen capaian tingkat pengangguran terbuka di tahun 2019. Tingginya angka tingkat pengangguran terbuka di Bali di tahun 2020 karena Bali merupakan destinasi pariwisata, ketergantungan Bali terhadap pariwisata sangat berimbas terhadap krisisnya ekonomi Bali pada masa pandemi Covid-19 yang membuat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.

Variabel Belanja Modal menunjukkan nilai koefisien regresi  $\beta_2$  sebesar 3,43 dengan nilai  $t_{hitung} (2,615) > t_{tabel} (1,667)$  dan  $sig. t_{hitung} = 0,01 < \alpha = 0,05$  berarti bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Makna koefisien regresi belanja modal sebesar 3,43 memiliki arti bahwa apabila pemerintah daerah menaikkan anggaran belanja modal sebesar satu juta rupiah perkapita maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 3,43 poin dengan asumsi variabel bebas lain dalam model nilainya konstan. Belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan



Belanja modal merupakan salah satu bentuk investasi non-profit pemerintah berupa aset tetap maupun aset lainnya yang dihasilkan relatif selalu bersinggungan dengan pelayanan publik yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Adanya Kegiatan Belanja Modal selalu dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur. Adanya pembangunan infrastruktur yang merata pada setiap daerah maka akan memicu keinginan investasi dari para investor, baik investor asing maupun investor lokal untuk membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi setiap daerah, hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan infrastruktur, bagi investor semakin mudah dalam mengakses pelayanan publik seperti fasilitas keamanan dan pelayanan, sehingga dengan terbukanya perluasan lapangan pekerjaan diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan berpeluang memperoleh pendapatan yang layak yang akan meningkatkan pendapatan riil perkapita serta meningkatnya daya beli masyarakat untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang memadai, mengurangi angka pengangguran dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari Lanjouw, et al (2001), menemukan hasil yang serupa bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pendanaan terhadap penyediaan fasilitas umum yang akan digunakan oleh masyarakat memiliki hubungan searah dengan jumlah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum yang diperlukan. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik termasuk bidang pendidikan dan kesehatan akan mampu meningkatkan kapasitas serta berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sehingga hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas pembangunan manusia.

Variabel Ketimpangan Distribusi Pendapatan menunjukkan nilai koefisien regresi  $\beta_3$  sebesar -23,67 dengan nilai  $t_{hitung} (-2,098) > t_{tabel} (-1,667)$  dan  $sig. t_{hitung} = 0,03 < \alpha = 0,05$  berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Makna koefisien regresi ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Ratio) sebesar 23,67 memiliki arti bahwa apabila ketimpangan distribusi pendapatan melalui koefisien Gini Ratio meningkat satu poin maka Indeks Pembangunan Manusia akan menurun sebesar 23,67 poin dengan asumsi variabel bebas lain dalam model nilainya konstan. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan Adanya Ketimpangan distribusi pendapatan antar penerima pendapatan pada suatu wilayah menyebabkan bertambah lebarnya jurang pendapatan antar orang yang kaya dengan orang yang miskin. Hal ini akan memberikan implikasi bahwa orang yang kaya akan semakin meningkat kekayaannya sehingga kemampuan mereka untuk mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin besar sedangkan orang miskin akan mengalami kecenderungan memiliki pendapatan yang stagnan sehingga kemampuan orang miskin untuk mengakses pendidikan dan kesehatan akan semakin rendah, hal ini disebabkan karena dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menyebabkan seluruh pembiayaan untuk memperoleh akses pendidikan dan kesehatan cenderung meningkat, sehingga hal ini akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat akan cenderung menurun. Sehingga dapat dikatakan adanya ketimpangan pendapatan antar penerima pendapatan akan berimplikasi negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Alesina & Rodric (2012), mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ping wan (1996), yang menyatakan bahwa adanya perluasan disparitas pendapatan antar penerima pendapatan pada setiap daerah akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan sosial, sedangkan menurunnya angka disparitas pendapatan antarwilayah akan tercapainya pembangunan yang merata dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah *Unstandardized Residual* dari model regresi dan data penelitian berdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan *Jarque-Bera Test*. Hasil pengujian diperoleh bahwa nilai probability dari Jarque-bera sebesar 0,68 lebih besar dari *level of significant*, yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada model regresi yang diuji dan diterapkan dalam model sudah berdistribusi normal.

Pengujian dilakukan untuk memastikan apakah dalam model regresi yang ditetapkan terdapat interkorelasi atau kolinearitas antara variabel bebas, dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflating Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas. Hasil pengujian diperoleh bahwa setiap variabel bebas menunjukkan nilai yang tidak melebihi standard VIF yaitu tidak lebih dari 10. Oleh karena itu berdasarkan nilai VIF pada model analisis, maka model regresi yang diuji dan ditetapkan tidak terdapat interkorelasi atau kolinearitas antara variabel bebas sehingga dapat disimpulkan tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas pada model.

Pengujian dilakukan untuk menilai apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual untuk semua atau salah satu pengamatan pada model regresi linier, dengan menggunakan uji *White*. Hasil pengujian diperoleh nilai *probability Obs\*R-squared* berada diatas tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $\alpha$ ) yaitu,  $0,1145 > \alpha$  (0,05). Hal ini berarti tidak terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada setiap variabel bebas pada model regresi untuk semua pengamatan atau dengan kata lain bahwa setiap varians adalah sama atau homokedastisitas, sehingga dapat disimpulkan model regresi bebas dari masalah heterokedastisitas

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2013-2020. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2013-2020. Ketimpangan Distribusi Pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2013-2020

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah daerah Provinsi Bali harus lebih bijak dalam memperhatikan perolehan Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran belanja yang dikeluarkan. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia seharusnya ketergantungan pemerintah daerah Bali terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat diminimalisasi dengan memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Anggaran belanja daerah yang perlu dicermati oleh pemerintah daerah Provinsi Bali yaitu mengefisienkan anggaran belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan sebagainya, sehingga proporsi anggaran belanja modal dapat ditingkatkan. Anggaran pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan seharusnya lebih intensif menjadi perhatian pemerintah agar dapat terdistribusi dengan baik secara merata dan pembangunan infrastruktur semestinya diutamakan pada daerah-daerah yang masih tertinggal, sehingga pemerintah dalam pelaksanaan programnya selain mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan juga agar lebih intensif dalam melaksanakan upaya pemerataan distribusi pendapatan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

## REFERENSI

- Abdel-Rahman, Hesham and Ping Wang. (1996). Social Welfare and Income Inequality in a System of Cities. *Department of Economics and Finance, University of New Orleans, New Orleans*. Vol. 41 No.3 PP:462-483
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Peberbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta
- Bati. (2009). Pengaruh Belanja Modal dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi PADA Kabupaten dan Kota di Sumatra Utara). *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan*. Vol 1 No 1 pp: 1-21
- BPS. (2017). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota SE- Provinsi Bali 2013-2017*. ISSN: 2477-7773

- BPS. (2018). *Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali*. ISSN: 2356-4652.
- BPS. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota SE- Provinsi Bali 2014-2018*. ISSN: 2477-7773
- Delavallade, Clara. (2006). Corruption and Distribution of Publik Spending in Developing Countries. *Journal of Economics and Finance*. Vol. 30. No. 2 pp: 1-10
- Halim, A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik dan Manajemen Sektor Publik*. Malang
- Lanjouw, P., Pradhan, M., Saadah, F., Sayed, H., & Sparrow, R. (2001). Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Publik Spending? In World Bank Working Paper. Washington D.C. *World Bank Working Paper*
- Lugastoro, Decta Pitron. (2013). Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol 1 No 2, pp:1-12
- Martinez, V. J. M., & McNab, R. (2001). Fiscal decentralization, economic growth, and democratic governance. Working Paper
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap IPM Jawa Tengah. *JEIAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, Vol 4 No 2, pp: 1-12
- Mirza, Denni Sulistio. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, EDAJ. Vol 1 No 1 pp:1-12
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, Vol 46 No 3, pp: 1-21
- Pardede, N. W. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara
- Patta, Devyanti. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin, Makasar
- Rahmayanti Anim, dan Pertiwi Putri. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Accounting* Vol. 1 No. 1 pp: 45-62
- Rustariyuni, Surya Dewi. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol.X, No.1, pp:1-23
- Setyowati, L dan Suparwati, Y.K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dau, dak, pad terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. *Prestasi*. Vol.9 No.1, pp: 1-21